

## DAFTAR PUSTAKA

- Ati Rosliyati, Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal wawasan dan Riset Akuntansi Volume 1 No 2, Maret 2014, hal. 66-77*
- Dwi, S. H, Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Bangkit Indonesia, Vol. VIII, No. 01, Bulan Maret 2019.*
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hariyadi, R. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pemahaman Akuntansi dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 15–39.
- Hasni , Y & Rika H. S Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Lingkungan Pemerintah Palembang. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya Vol. 13 N.4 Desember 2015*
- Hendri,M & Anne, P Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi 23(1) Maret 2020 (50-66)*
- Ihyaul, U. (2015). *Akuntansi Sektor Publik dilengkapi dengan Contoh-Contoh Penelitian dan Panduan Tugas Semester Akhir*. Graha Ilmu.
- Krismiaji. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. UPP AMP YKPN.
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Jakarta , 2003.* (2003).
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP Sekolah.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik Edisi IV*. Andi.
- Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.

- Pandapotan, H., Sembiring, L. D., Azwar, K., Ervina, N., Putri, D. E., Supitriyani, Manurung, S., Susanti, E., Grace, E., Moridu, I., Putri, J. A., & Nainggolan, C. D. (2016). *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Grasindo.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Taushia.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. (2014). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*. 1689–1699.
- Peraturan Pemerintah, N. 60. (2008). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. *Per UU*, 53(9), 1689–1699.
- Rahayu, S., & Suhayati, E. (2017). *siti.pdf*. Graha Ilmu.
- Sakina, D., Wahyuni, N., & Mas'ud, I. (2014). Narsisme Dalam Pelaporan Corporate Social Responsibility: Analisis Semiotik atas Sustainability Reporting PT . Kaltim Prima Coal dan PT . Perkebunan Nusantara XIII ( Persero ) of Sustainability Reporting PT . Kaltim Prima Coal and PT . Perkebunan Nusant. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 1(40), 32–41.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Palembang: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya
- Zulharman, K., Zulfahridar, Z., & Hariadi, H. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 3396

